

# Sistem P-MAN Dalam Pengelolaan PBB-P2 Pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi Kabupaten Bogor

Warizal<sup>1</sup>, Susy Hambani<sup>2</sup>, Zahra Amalia<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Djuanda, Program Studi Akuntansi, Indonesia

[warizal@unida.ac.id](mailto:warizal@unida.ac.id), [susy.hambani@unida.ac.id](mailto:susy.hambani@unida.ac.id), [c.2210135@unida.ac.id](mailto:c.2210135@unida.ac.id)

---

---

## ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya terus ditingkatkan melalui digitalisasi layanan. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi Kabupaten Bogor adalah **Sistem P-MAN (Pelaporan Mandiri)**, yakni sistem pelaporan dan pencatatan penerimaan pajak secara elektronik berbasis sistem informasi akuntansi. Meskipun sistem ini telah berjalan, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas pelaksanaannya, jenis dokumen yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem P-MAN dalam pengelolaan PBB-P2, mengidentifikasi dokumen yang digunakan, dan menganalisis kendala yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P-MAN mampu meningkatkan efisiensi pencatatan dan pemantauan pembayaran pajak. Namun, masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaporan, dominasi administrasi manual, kendala teknis dalam verifikasi lapangan akibat keterbatasan jaringan internet, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan dengan distribusi SPPT yang menyebabkan duplikasi kerja. Dengan demikian, meskipun P-MAN memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital pajak daerah, optimalisasi sistem, peningkatan sosialisasi, serta penguatan infrastruktur dan SDM tetap diperlukan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Pajak Daerah, PBB-P2, Pelaporan Mandiri, P-MAN, Sistem Informasi Akuntansi, UPT Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor, memiliki tanggung jawab untuk mengelola PBB-P2 secara efektif. Dalam beberapa

tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan pajak daerah melalui sistem digital. Salah satu inovasi yang diadopsi adalah Sistem P-MAN (Pelaporan Mandiri), yang memungkinkan pengelolaan data objek pajak, pencatatan pembayaran, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga pemantauan realisasi penerimaan pajak dilakukan secara terintegrasi dan berbasis elektronik.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem ini di lapangan tidak terlepas dari tantangan, seperti keterlambatan distribusi SPPT ke desa, kesalahan pencatatan manual yang masih terjadi pada beberapa tahap, dan kesulitan dalam memantau kepatuhan wajib pajak secara real time. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem P-MAN diterapkan dalam pengelolaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, dokumen apa saja yang digunakan dalam proses tersebut, serta kendala yang dihadapi beserta strategi pemecahan yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sistem P-MAN, mengidentifikasi kelemahan yang masih ada, serta menawarkan rekomendasi perbaikan yang relevan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperjelas cara sistem P-MAN digunakan dalam mengelola PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi. Penelitian dilakukan di kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, yang terletak di Jalan Raya Puncak No. 20, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peserta penelitian adalah pegawai UPT yang secara langsung terlibat dalam proses administrasi dan operasional pengelolaan PBB-P2, meliputi staf administrasi, petugas lapangan, serta koordinator wilayah, yang memiliki peran penting dalam distribusi dan pelaporan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama. Pertama, observasi langsung terhadap alur kerja distribusi SPPT, mulai dari penerimaan dokumen dari BAPPENDA, verifikasi data, input ke dalam sistem P-MAN, hingga tahap pelaporan akhir. Kedua, wawancara semibertahap dilakukan terhadap staf yang terlibat untuk mengumpulkan informasi mengenai prosedur, masalah teknis, serta manfaat penggunaan sistem tersebut. Ketiga, dokumentasi berbagai dokumen yang digunakan, seperti SPPT, formulir pengakuan distribusi, bukti pembayaran, serta laporan realisasi pendapatan pajak, juga dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan sistem P-MAN serta memberikan interpretasi mendalam terhadap data yang dikumpulkan di lapangan.

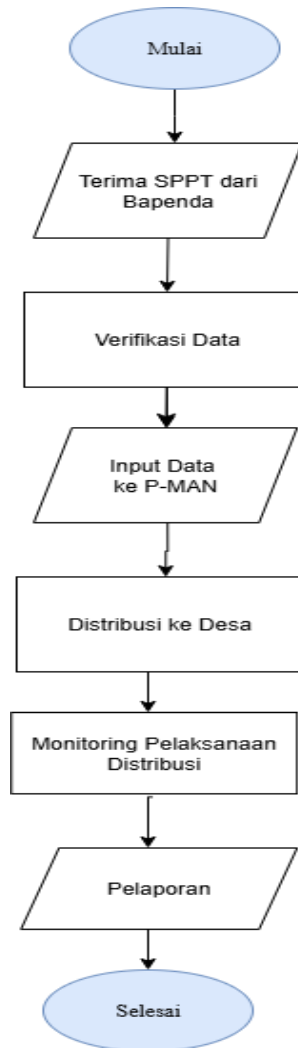
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem P-MAN di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi pengelolaan PBB-P2. Proses dimulai dari penerimaan SPPT yang dikirim oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor sebagai acuan resmi penetapan pajak terutang. Dokumen tersebut kemudian melalui tahap verifikasi oleh petugas, yang mencakup pengecekan identitas wajib pajak, nilai pajak terutang, dan kelengkapan informasi lainnya. Setelah diverifikasi, data SPPT dimasukkan ke dalam aplikasi P-MAN, yang berfungsi sebagai sistem pencatatan digital terpusat.

Sistem ini mempermudah proses pencarian data, penyusunan laporan, dan monitoring distribusi ke desa. Setelah data diinput, SPPT yang telah dicetak dan diverifikasi didistribusikan ke desa-desa sesuai wilayah kerja UPT. Proses distribusi ini diawasi secara langsung oleh koordinator wilayah untuk memastikan seluruh

dokumen sampai kepada wajib pajak tepat waktu. Monitoring dilakukan secara manual melalui laporan tanda terima dari desa, yang kemudian dicocokkan dengan data digital di P-MAN.

Berikut adalah flowchart alur proses Sistem P-MAN dalam pengelolaan PBB-P2:



Flowchart tersebut menggambarkan rangkaian proses mulai dari penerimaan dokumen SPPT hingga penyusunan laporan penerimaan pajak. Dengan adanya sistem P-MAN, proses ini menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manual dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak. Namun, kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan keterlambatan distribusi dokumen tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur dan koordinasi lintas pihak.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan sistem P-MAN tidak hanya ditentukan oleh perangkat teknologinya, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan efektivitas koordinasi antar pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen sistem informasi, di mana integrasi teknologi dan faktor manusia menjadi kunci keberhasilan implementasi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem P-MAN di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan PBB-P2, khususnya dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan, dan mempermudah proses pelaporan. Kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, keterlambatan distribusi dokumen, serta minimnya literasi digital sebagian petugas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi sistem.

Saran yang dapat diberikan antara lain adalah memperluas sosialisasi kepada wajib pajak terkait penggunaan kanal pembayaran digital, memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa untuk mempercepat distribusi dan pengembalian dokumen, serta mengembangkan fitur monitoring real time dalam Sistem P-MAN.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup satu UPT dan satu jenis pajak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh unit kerja pajak daerah. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan gambaran nyata penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan pajak daerah dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mencakup wilayah dan jenis pajak yang lebih luas.

## REFERENSI

- Ayu, M., Kuswarak, & Ikbal, M. (2022). Penyuluhan mengenai Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kelurahan Sukadanaham. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 689–694. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i3.1902>
- Djamhari, E. A., Tengku Harja, I., & Deco Praha, R. (2022, November 16). Pajak Kekayaan: Menakar Potensi dan Peluang Implementasi di Indonesia [Policy Brief]. Perkumpulan PRAKARSA. Tersedia secara daring di repository [PRAKARSA].
- Ekasetya, V. A., & Jananto, A. (2020). Klusterisasi Optimal dengan Elbow Method untuk Pengelompokan Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Informatika*, 12(1), 20–28. <https://doi.org/10.35315/informatika.v12i1.8159>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Kristanto, A. (2022). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya* (Edisi Revisi 2). Yogyakarta: Gava Media.
- Kudaling, G. M., Runtu, T., Latjandu, L. D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 957–966.
- Machmuda, N. O., Firdausi, F., Merry, R., & Wulandary, C. (2025). Inovasi Pendataan (PBB-P2) Berbasis Elektronik: E-SPOP & GIS-EL Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang di Desa Mancilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2024), 347–356.
- Muamarah, H. S. (2024). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kawasan Perhutanan Sosial: Telaah Literatur. *PKN: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 12–22.
- Nistrina, K., Muharam, Y., & Righa, L. (2022). Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta Berbasis Web pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *J-SIKA: Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, 4(02), 11–20.
- Pendapatan, B., Kabupaten, D., Desa, J. Di, Nurul, M., Machmuda, O., Firdausi, F., Merry, R., & Wulandary, C. (t.t.). Inovasi Pendataan (PBB-P2) Berbasis Elektronik: E-SPOP & GIS-EL. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%oi.6410>
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 113–120. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.47919>

Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.

Sutabri, T. (2021). *Analisis Sistem Informasi*. Jakarta: Andi.

UU Nomor 16 Tahun 2009. (t.t.).